

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Agen, yang diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976), telah berkembang menjadi konsep dasar dalam penelitian akuntansi, seperti yang dicatat oleh (Fitrianingsih et al., 2022). Kerangka kerja ini menantang akuntansi keuangan konvensional dengan memasukkan perilaku manusia ke dalam model ekonomi, mengakui bahwa keputusan manajerial sering kali dipengaruhi oleh kepentingan pribadi. Inti dari Teori Agen adalah analisis hubungan kompleks antara dua aktor utama yaitu manajer korporat (*agent*) dan pemilik (*principal*), dengan penekanan pada konflik kepentingan yang mungkin timbul dan insentif yang berbeda. Menurut teori ini, prinsipal menyerahkan wewenang pengambilan keputusan kepada agen yang memiliki keahlian lebih dalam mengelola bisnis dengan harapan bahwa agen akan bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal, khususnya untuk memaksimalkan keuntungan (Nopriani & Lestari, 2024).

Masalah inti yang mendasari teori keagenan (*agency theory*) adalah konflik kepentingan yang mendasar antara pemilik (*principal*) dan manajer (*agents*). Kedua kelompok ini seringkali mengejar tujuan yang berbeda dalam tata kelola korporasi, terutama dalam upaya mereka untuk mengoptimalkan manfaat dari hasil bisnis. Ketika kepemilikan dan manajemen dipisahkan, memunculkan situasi di mana keputusan agen mungkin tidak sejalan dengan kepentingan yang diinginkan pemilik atau dapat disebut *agency problem*.

Teori agen beroperasi berdasarkan asumsi bahwa individu secara alami berorientasi pada kepentingan diri sendiri yang menyebabkan perbedaan prioritas antara prinsipal dan agen. Sementara prinsipal berfokus memaksimalkan keuntungan perusahaan, di lain sisi agen memprioritaskan keamanan finansial mereka sendiri. Ketegangan ini semakin meningkat karena pengawasan prinsipal yang terbatas terhadap operasional sehari-hari, yang memungkinkan tindakan agen menyimpang dari harapan prinsipal (Titania & Taqwa, 2023). Pemberian wewenang pengambilan keputusan kepada manajer (agen) menciptakan situasi di mana mereka termotivasi untuk melaksanakan aksi strategis, operasional, dan taktis yang sesuai dengan kepentingan mereka, yang pada akhirnya menimbulkan konflik kepentingan yang sulit diselesaikan. Akibatnya, kesuksesan keseluruhan bisnis dapat terganggu akibat konflik kepentingan antara agen dan atasan mereka, seringkali dengan mengorbankan kepentingan atasan (Agasva & Budiantoro, 2020).

Teori agen menyatakan bahwa kepentingan diri mendorong perilaku manusia, mendorong agen untuk memanfaatkan keunggulan informasi mereka dan menyembunyikan detail tertentu dari prinsipal. Ketidakseimbangan informasi ini, ditambah dengan kepentingan yang bertentangan, mendorong agen untuk memutarbalikkan kebenaran, terutama ketika hal itu berkaitan dengan penilaian kinerja mereka sendiri, sebagai manuver strategis (Sari *et al.*, 2024). Ketidakseimbangan informasi antara manajemen (agen) dan pemilik (prinsipal) menciptakan tantangan fundamental dalam tata kelola korporasi. Ketika agen memiliki pengetahuan yang lebih unggul tentang operasional perusahaan, mereka dapat memanfaatkan keunggulan informasi ini untuk memanipulasi pelaporan

keuangan. Perilaku oportunistik semacam ini pada akhirnya menyebabkan inefisiensi yang muncul sebagai biaya agen bagi organisasi (Aprila *et al.*, 2022).

Watts dan Zimmerman (1986) serta Jansen dan Meckling (1976) berpendapat bahwa laporan keuangan, yang disusun berdasarkan data akuntansi, dirancang untuk mengurangi sengketa di antara pemangku kepentingan. Pemilik modal dapat memanfaatkan laporan keuangan yang diserahkan oleh agen sebagai alat untuk mengevaluasi, mengukur, dan mengawasi upaya agen dalam meningkatkan kesejahteraan mereka, dan selanjutnya memberikan kompensasi yang sesuai kepada agen. Implementasi praktik GCG yang kuat berfungsi sebagai mekanisme efektif untuk mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dan direksi. Dengan menetapkan kerangka kerja pengambilan keputusan yang transparan dan struktur pertanggungjawaban, GCG membantu menyelaraskan kepentingan kedua belah pihak sambil mengurangi perilaku oportunistik (Arimby & Astuti, 2023).

Menurut (Suryanto, 2019), tata kelola korporasi berpusat pada pertanyaan tentang siapa yang seharusnya mengendalikan operasional perusahaan dan mengapa pengawasan tersebut penting. Istilah “siapa” merujuk pada pemegang saham atau pemegang kepentingan utama, sementara “mengapa” berkaitan dengan hubungan antara pemegang saham dan berbagai pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan di perusahaan. Tata kelola korporasi yang efektif terwujud ketika perusahaan dapat mengatur perilaku manajerial dalam pengelolaan sumber daya secara efektif. Hal ini mencakup kumpulan norma perilaku korporasi, yang dievaluasi melalui kinerja, penilaian perusahaan, struktur keuangan, perlakuan

terhadap pemegang saham, dan keterlibatan pemangku kepentingan. Pola ini dapat dijadikan dasar dalam menganalisis tata kelola perusahaan di suatu negara, dengan menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan secara sistematis. Pendekatan ini juga berfungsi sebagai dasar untuk pengukuran kinerja perusahaan yang lebih akurat.

Kerangka teori agen menyediakan metodologi sistematis untuk mengatur interaksi antara prinsipal dan wakil yang ditunjuknya, dengan memperkenalkan mekanisme yang menyelaraskan tujuan mereka dan memitigasi potensi konflik kepentingan, sehingga mendorong terbentuknya kemitraan yang lebih selaras dan efektif. Dengan merancang insentif yang tepat dan mekanisme pengamanan, teori ini bertujuan untuk memotivasi agen agar memprioritaskan tujuan prinsipal. Alat-alat kunci meliputi kontrak berbasis kinerja, sistem pemantauan, struktur penghargaan, dan persyaratan pengungkapan, yang bekerja secara kolektif untuk meminimalkan risiko agen dan perilaku oportunistik (Pramanaswari, 2024). Penerapan prinsip-prinsip GCG bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan terhadap pengelolaan dana investor oleh pihak yang bertugas, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan kredibilitas mereka (Febriansyah & Fahreza, 2020).

Teori agen dan perencanaan sumber daya perusahaan (ERP) saling terkait dalam upaya mengurangi masalah agen antara pemilik (*principals*) dan manajemen (*agents*). Sistem ERP dapat menghasilkan data dan wawasan yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan perusahaan, sehingga mengurangi biaya agen dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Sistem ERP secara signifikan mengurangi pengeluaran organisasi dengan mengoptimalkan proses pengawasan

dan pemeliharaan. Optimasi operasional ini secara langsung meningkatkan efisiensi dan kinerja bisnis secara keseluruhan. Sistem informasi perusahaan yang efektif, dalam konteks implementasi ERP, harus memfasilitasi integrasi data dan mempromosikan praktik terbaik, sehingga menghasilkan data, dokumen, laporan, dan informasi berkualitas tinggi yang memperlancar proses bisnis (Nazhfiyani et al., 2022)

2.1.2 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan, yang digambarkan melalui alat analisis keuangan, memberikan gambaran komprehensif tentang kesehatan keuangan suatu perusahaan, menunjukkan apakah kondisinya baik atau buruk selama periode tertentu. (Saputri et al., 2023) mengonseptualisasikan kinerja keuangan sebagai kerangka analisis multidimensi yang mengevaluasi kepatuhan organisasi terhadap standar keuangan yang ditetapkan dan persyaratan regulasi. Proses evaluasi ini berfungsi sebagai alat diagnostik kritis, secara sistematis menganalisis efektivitas operasional suatu korporasi dalam mencapai keuntungan optimal dan mempertahankan posisi likuiditas yang sehat. Pengukuran kinerja keuangan memungkinkan identifikasi potensi pertumbuhan dan kemajuan finansial perusahaan berdasarkan pengelolaan sumber daya yang efektif.

Kinerja keuangan perusahaan-perusahaan yang diteliti dievaluasi dengan menganalisis profitabilitas melalui rasio ROA. ROA berfungsi sebagai metrik profitabilitas kritis, yang mengevaluasi seberapa efektif suatu perusahaan mengubah asetnya menjadi laba bersih. Seperti yang disebutkan oleh (Linggasari & Adnantara, 2020) ROA mengukur efisiensi penggunaan aset dalam

menghasilkan laba bersih. Rasio keuangan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan organisasi dalam menghasilkan laba melalui penggunaan aset yang optimal (Saputri et al., 2023). Nilai ROA yang tinggi umumnya menandakan kinerja korporat yang lebih baik, menjadikan rasio ini sangat berharga bagi investor dalam menilai potensi peluang investasi. Dalam penelitian ini *Return On Assets* diukur berdasar penelitian dari (Arimby & Astuti, 2023) dan (Yuliyanti & Cahyonowati, 2023) dengan persamaan sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

2.1.3 Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning (ERP) merupakan merupakan sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan seluruh sumber daya, informasi dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis secara lengkap (Arkay et al., 2024). Sistem informasi perusahaan yang baik seharusnya menciptakan integrasi data dan praktik terbaik di lingkungan perusahaan yang telah menerapkan *enterprise resource planning*, agar mendapatkan output berupa data, dokumen dan laporan keuangan yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Pemegang saham memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan tepat waktu, serta perusahaan memiliki kewajiban untuk mengungkapkan secara transparan, akurat, tepat waktu mengenai semua informasi dalam kinerja keuangan perusahaan. Sehingga, dibutuhkan peran *Good Corporate Governance* secara optimal untuk mengawasi keberlangsungan implementasi ERP pada perusahaan.

2.1.4 Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) merujuk pada sistem pengelolaan perusahaan yang didasarkan pada prinsip-prinsip transparansi, keadilan, dan independensi (Arimby & Astuti, 2023). Seperti yang diuraikan dalam *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI), GCG berfungsi sebagai kerangka kerja komprehensif yang mengatur interaksi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, manajemen, kreditor, badan pemerintah, karyawan, dan pihak internal maupun eksternal lainnya. Dengan demikian, GCG menetapkan peran, tanggung jawab, dan hak yang jelas bagi setiap kelompok pemangku kepentingan, sehingga mendorong distribusi kekuasaan, akuntabilitas, dan manfaat yang seimbang dan harmonis di dalam organisasi. Pada intinya, tata kelola perusahaan berperan sebagai mekanisme pengaturan yang memastikan akuntabilitas dan pengawasan yang tepat dalam pengelolaan perusahaan (Darmayanti & Arigawati, 2023).

Monk dalam (Subiyanti & Zannati, 2019), menyatakan bahwa GCG berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengatur, mengawasi, dan meningkatkan nilai suatu organisasi bagi para pemangku kepentingannya. Pada dasarnya, GCG berperan sebagai mekanisme terstruktur yang tidak hanya mengawasi dan mengarahkan operasional korporasi, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap standar hukum dan regulasi sehingga pada akhirnya menghasilkan nilai berkelanjutan bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat. Dalam melaksanakan pengurusannya *Good Corporate Governance* terdiri dari 5 unsur berdasarkan maklumat Komite Nasional Kebijakan Governance. Adapun kelima

unsur tersebut adalah:

1. Keterbukaan (*Transparency*)
2. Akuntabilitas (*Accountability*)
3. Pertanggung Jawaban (*Responsibility*)
4. Kemandirian (*Independency*)
5. Kewajaran (*Fairness*)

Good Corporate Governance sebagai variabel independen dinilai dengan menggunakan proksi dewan direksi, dewan komisaris independen, dan komite audit.

2.1.4.1 Dewan Direksi

Dewan direksi bertindak sebagai kepemimpinan strategis perusahaan, yang diberi mandat untuk mengelola operasional perusahaan secara menyeluruh sambil menyeimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan (Nopriani & Lestari, 2024). Seperti yang tercantum dalam POJK 33/2014, Dewan Direksi memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas tata kelola organisasi, memastikan keselarasan dengan tujuan perusahaan (Yuliyanti & Cahyonowati, 2023). Dalam hierarki perusahaan publik Indonesia, Dewan Direksi menempati posisi ketiga dalam hierarki kekuasaan, di bawah RUPS dan Dewan Komisaris. Memimpin badan eksekutif ini adalah Direktur Utama, yang menempati posisi tertinggi dalam struktur Dewan Direksi.

Tata kelola korporasi dan kinerja keuangan sangat bergantung pada pengawasan dewan direksi. Seperti yang tercantum dalam anggaran dasar, dewan

direksi memiliki wewenang untuk mengawasi semua hal, baik yang bersifat umum maupun khusus, sebaik mungkin (PJOK 33/2014). Papan direksi yang lebih besar memerlukan tingkat keahlian yang lebih tinggi untuk menerapkan praktik tata kelola korporasi yang efektif. Dalam penelitian ini dewan direksi diukur berdasar penelitian dari (Nopriani & Lestari, 2024) dan (Rahmawati & Mutmainah, 2024) dengan menggunakan rumus berikut:

$$DD = \sum \text{Anggota Dewan Direksi Perusahaan}$$

2.1.4.2 Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen bertindak sebagai pengawas yang independen dalam tata kelola perusahaan, memberikan pengawasan yang imparial. Peran dewan ini meliputi memberikan evaluasi yang adil terhadap kinerja perusahaan dan mengambil keputusan secara mandiri, tanpa terpengaruh oleh tekanan dari direksi, anggota dewan komisaris lainnya, pemegang saham, atau manajemen. Kemandirian bagi komisaris menjadi suatu persyaratan penting dalam struktur perusahaan publik, guna menjalankan tanggung jawab secara optimal. Salah satu tugas utama dewan komisaris adalah menetapkan kebijakan tata kelola yang sesuai dengan kerangka kerja GCG dan memastikan bahwa perusahaan beroperasi dalam batas-batas hukum dan etika. Dewan komisaris independen dapat dilihat dari besarnya presentase komisaris independen dengan jumlah dewan komisaris. Menurut (Daljono & Margaret, 2023) dan (Putri, 2020) dewan komisaris independen dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$DKI = \frac{\text{Jumlah anggota Dewan Komisaris Independen}}{\text{Jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$$

2.1.4.3 Komite Audit

Sesuai dengan ketentuan POJK 55/POJK.04/2015, Komite Audit ditunjuk sebagai badan penasihat yang dibentuk dan diawasi oleh Dewan Komisaris, yang bertanggung jawab atas pembentukannya dan pengawasan terhadapnya. Sebagai komponen kunci dalam struktur tata kelola korporasi, Komite Audit bertugas memberikan dukungan dan penguatan kepada Komite Manajemen Risiko dalam kapasitas pengawasannya, serta memastikan pelaksanaan proses audit yang efektif, keakuratan pelaporan keuangan, dan penerapan prinsip-prinsip GCG secara ketat, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan praktik GCG di dalam organisasi (Nopriani & Lestari, 2024). Tugas utama dari komite audit adalah mengawasi langkah-langkah yang diambil oleh manajemen perusahaan, menjadikannya sebagai elemen kunci yang sangat penting dalam memastikan keakuratan informasi yang dapat diakses oleh publik. Dalam konteks ini, pentingnya memiliki komite audit adalah untuk mengawasi sejauh mana manajemen perusahaan bersikap transparan dalam mengungkapkan informasi dan memastikan kinerja optimal dari pengendalian internal. Ukuran Komite Audit, baik besar maupun kecil, sepenuhnya bergantung pada jumlah anggotanya. Penelitian (Rahmawati & Mutmainah, 2024) mengusulkan rumus untuk menghitung rasio Komite Audit:

$$KA = \sum \text{Anggota Komite Audit Perusahaan}$$

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya memberikan manfaat bagi penelitian ini, karena

membantu mengidentifikasi permasalahan yang relevan untuk diteliti lebih lanjut. Studi-studi sebelumnya tentang GCG, yang menggunakan berbagai variabel independen, telah menghasilkan hasil yang bervariasi, memberikan acuan dasar bagi para peneliti di bidang ini.

Penelitian empiris terbaru mengungkapkan hubungan yang kompleks antara mekanisme tata kelola korporasi dan kinerja keuangan di berbagai industri di Indonesia. (Nopriani & Lestari, 2024) menunjukkan bahwa pada perusahaan properti dan *real estate* (2019–2023), pengawasan independen (komisaris dan komite audit) serta ukuran perusahaan meningkatkan kinerja keuangan, sedangkan dewan direksi dan struktur modal menunjukkan efek yang tidak signifikan. Demikian pula, (Nazhfiyani KS *et al.*, 2022) menemukan bahwa perusahaan manufaktur yang menggunakan sistem ERP memperoleh pengaruh positif signifikan dari GCG dengan proksi dewan komisaris independen dan diversifikasi.

Hasil yang kontras muncul pada perusahaan milik negara (Titania & Taqwa, 2023), di mana hanya variabel dewan komisaris independen yang secara signifikan meningkatkan kinerja, sementara komite audit dan kepemilikan manajemen tidak memiliki dampak yang terukur. Studi di sektor pertambangan semakin memperumit narasi: (Arimby & Astuti, 2023) melaporkan komite audit sebagai satu-satunya pendorong tata kelola, sedangkan (Lukito & Abubakar Arief, 2024) mengidentifikasi dampak positif dari komite audit, komisaris independen, dan kepemilikan manajemen tetapi dampak negatif dari dewan direksi.

Analisis sektor perbankan menyoroti perbedaan tambahan, temuan (Hadyan, 2021) hanya mengaitkan peran kepemilikan manajemen terhadap kinerja keuangan,

mengabaikan kepemilikan institusional, komisaris independen dan komite audit. Sebaliknya, (Pramudityo & Sofie, 2023) mengamati bahwa dewan direksi saja yang meningkatkan kinerja bank, sementara komite audit dan komisaris independen terbukti tidak efektif.

Tabel penelitian terdahulu ditunjukkan di bawah ini untuk mengevaluasi hasil penelitian masing-masing variabel.

Tabel 2. 1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1	Tarisa Nopriani dan Indah Rahayu Lestari, 2024	Variabel X : • Dewan Direksi • Dewan Komisaris Independen • Komite Audit • Struktur Modal • Ukuran Perusahaan Variabel Y : • Kinerja Keuangan	• Dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan • Dewan komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan • Komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan • Struktur modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan • Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan
2	Nazhfiyani KS, Rita Rahayu dan Rayna Kartika, 2022	Variabel X : • <i>Corporate Governance</i> • Diversifikasi • leverage Variabel Y : • Kinerja Keuangan	• <i>Corporate governance</i> berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang telah menerapkan <i>enterprise resource planning</i> • Diversifikasi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan yang telah menerapkan <i>enterprise</i>

			<i>resource planning</i>
3	Helin Titania dan Salma Taqwa, 2023	Variabel X : • Dewan Komisaris Independen • Komite Audit • Kepemilikan Manajerial Variabel Y : • Kinerja Keuangan	• Dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan • Komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan • Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
4	Rista Arimby dan Tutut Dewi Astuti, 2023	Variabel X : • Kepemilikan Institusional • Dewan Komisaris Independen • Komite Audit Variabel Y : • Kinerja Keuangan	• Kepemilikan institusional terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan • Dewan komisaris independen terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan • Komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan
5	Haryo Lukito Jati dan Abubakar Arif, 2024	Variabel X: • Komite Audit • Dewan Komisaris Independen • Dewan Direksi • Kepemilikan Manajerial Variabel Y : • Kinerja Keuangan	• Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan • Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan • Dewan direksi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan • Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan
6	Mayla Hadyan, 2021	Variabel X: • Kepemilikan Institusional	• Hasil penelitian menunjukkan secara parsial kepemilikan manajerial

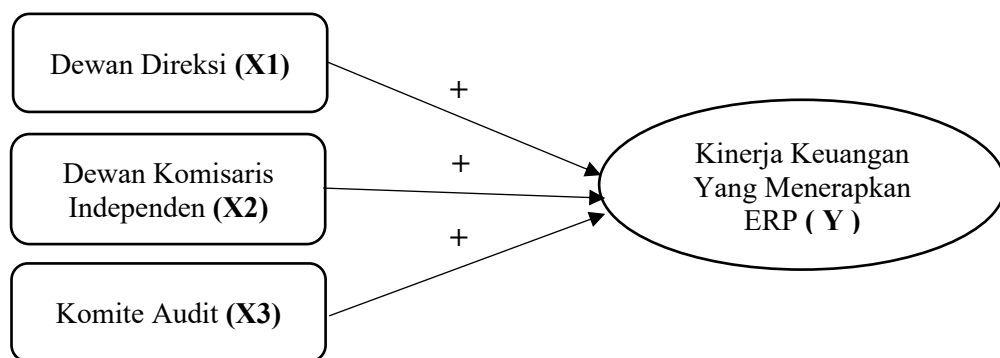
		• Kepemilikan Manajerial • Komisaris Independen • Komite Audit Variabel Y : • Kinerja Keuangan	berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan • Secara parsial kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
7	Wifa Arum Pramudityo dan Sofie, 2023	Variabel X : • Komite Audit • Dewan Komisaris Independen • Dewan Direksi • Kepemilikan Institusional Variabel Y: • Kinerja Keuangan	• Komite audit tidak berpengaruh positif terhadap kinerja • Dewan komisaris independen tidak berpengaruh positif terhadap kinerja • Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan • Kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dicantumkan, pada penelitian ini tidak terdapat variabel baru yang ditambahkan. Penelitian ini mengkaji dampak GCG terhadap ROA pada perusahaan manufaktur yang menggunakan ERP, dengan mereplikasi ukuran tata kelola standar (dewan direksi, dewan komisaris independen, dan komite audit) untuk memastikan kesesuaian dengan literatur. Desain penelitian ini memprioritaskan kesesuaian data daripada inovasi variabel guna mengisolasi efek tata kelola yang spesifik pada sektor tertentu.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian berfungsi sebagai panduan konseptual yang menggambarkan keterkaitan antar variabel yang diteliti. Dalam

penelitian ini, kerangka pemikiran disusun untuk menunjukkan hubungan antara dewan direksi, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap kinerja keuangan berbasis *Enterprise Resource Planning* pada perusahaan manufaktur yang diukur menggunakan ROA. Dewan direksi mencerminkan efektivitas kepemimpinan dan pengambilan keputusan strategis perusahaan, dewan komisaris independen menggambarkan mekanisme pengawasan dan independensi dalam pengelolaan perusahaan, sedangkan komite audit mengindikasikan perkembangan kualitas tata kelola keuangan dan pengendalian internal perusahaan. Ketiga variabel tersebut diasumsikan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan melalui implementasi *Enterprise Resource Planning* yang efektif. Oleh karena itu, kerangka pemikiran yang ditampilkan pada gambar 2.1 bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai hubungan antar variabel dalam penelitian ini.



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber data : Data diolah, 2025

2.3 Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan Berbasis ERP

Penelitian oleh (Wijaya & Suhendah, 2023) menegaskan bahwa dewan

direksi merupakan mekanisme internal yang integral dalam GCG, yang bertanggung jawab atas proses pelaporan keuangan. Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) menganjurkan komposisi dewan direksi yang dinamis, di mana jumlah direksi disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dan kebutuhan pemangku kepentingan eksternal. Meskipun peraturan POJK menetapkan batas minimum dua direksi, bukti empiris menunjukkan bahwa dewan direksi yang lebih besar sering kali terkait dengan hasil keuangan yang lebih baik, asalkan proses pengambilan keputusan tetap efisien (Roihanah & Akbar, 2024). Penelitian yang ada secara konsisten menunjukkan peran penting dewan direksi dalam membentuk hasil keuangan korporasi, menjadikannya sebagai proksi yang andal untuk mengevaluasi dampak GCG terhadap metrik kesehatan keuangan berbasis ROA. Studi sektoral terbaru memperkuat hubungan ini: analisis sektor perbankan menggunakan data IDX periode 2017-2021 oleh (Pramudityo & Sofie, 2023), temuan lintas industri oleh (Roihanah & Akbar, 2024) dan penelitian industri siklikal konsumen oleh (Aviana et al., 2024) semuanya mengonfirmasi adanya hubungan positif antara kualitas tata kelola dewan direksi dan indikator kinerja keuangan.

Menurut perspektif teori agensi, direksi bertindak sebagai wali amanah yang menjembatani kepentingan pemangku kepentingan dengan strategi perusahaan. Dewan direksi bertugas menjadi penentu kebijakan perusahaan baik dalam jangka panjang atau pendek, serta bertanggung jawab atas perkembangan perusahaan. Selain itu, dewan direksi menjadi perwakilan perusahaan di dalam atau luar perusahaan. Tanggung jawab direksi ini secara langsung berkorelasi dengan hasil

kinerja keuangan yang lebih baik (Yuliyanti & Cahyonowati, 2023). Dalam konteks hubungan agen, prinsipal atau pemilik memiliki harapan yang wajar bahwa tim manajemen atau dewan direksi akan melaksanakan tugasnya dengan kesetiaan, ketelitian, dan integritas yang tinggi, memprioritaskan kepentingan pemegang saham, dan berupaya mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan, sambil tetap mematuhi kewajiban kontraktual dan kerangka hukum yang berlaku. Namun, ketika dewan direksi gagal memenuhi tanggung jawabnya dengan penuh kewaspadaan, membiarkan inefisiensi, penyalahgunaan aset perusahaan, atau keputusan yang menguntungkan diri sendiri terjadi, atau ketika praktik manajemen keuangan kurang transparan, hal ini dapat menimbulkan konflik agen. Hal ini karena prinsipal mungkin menganggap bahwa manajemen tidak mampu mengelola sumber daya perusahaan secara efektif, sehingga melanggar kepercayaan dan keyakinan yang menjadi dasar hubungan agen.

Sebagai alat kunci dalam *Good Corporate Governance*, dewan direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, dengan peran penting dalam efektivitas pengawasan, kualitas pengambilan keputusan strategis, dan pada akhirnya, kemampuan organisasi untuk meningkatkan keuntungan. Dengan menumbuhkan budaya tata kelola yang prudent, dewan direksi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengambilan keputusan yang terinformasi, manajemen risiko yang ketat, dan alokasi sumber daya yang optimal, sehingga mendorong kesuksesan bisnis dan memperkuat prospek keuangan jangka panjang perusahaan. Sebaliknya, dewan direksi yang kurang efektif dalam menerapkan GCG berpotensi membiarkan pengelolaan keuangan yang kurang

optimal, tercermin dari *inefisiensi* atau investasi yang kurang tepat. Kondisi ini dapat meningkatkan beban keuangan perusahaan dan menciptakan ketidakseimbangan pengelolaan. Mengingat peran penting dewan direksi dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG, memastikan pengelolaan keuangan yang sehat, dan mendukung kinerja perusahaan, hipotesis berikut diajukan:

H1: Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang menerapkan *Enterprise Resource Planning*.

2.3.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kinerja Keuangan Berbasis ERP

Penelitian (Subiyanti & Zannati, 2019) menempatkan komisioner independen sebagai mekanisme tata kelola yang krusial, menggambarkan mereka sebagai pengawas yang tidak berpihak dengan dua mandat: melindungi hak pemegang saham minoritas sambil mempertahankan pengaruh dalam pengambilan keputusan strategis. Kemandirian struktural mereka dari manajemen, komisioner lain, dan pemegang saham dominan memungkinkan pemantauan objektif yang memitigasi konflik agen-prinsipal. Fungsi pengawasan ini mengoptimalkan alokasi sumber daya, terutama pemanfaatan aset, yang pada akhirnya meningkatkan metrik keuntungan seperti ROA melalui pengawasan yang seimbang dan bebas konflik. Selain itu, mereka tidak terikat oleh afiliasi komersial atau pribadi apa pun yang berpotensi mengganggu independensi mereka, sehingga mereka dapat bertindak dengan objektivitas yang tidak terganggu dan sepenuhnya demi kepentingan terbaik organisasi, tanpa terhalang oleh konflik kepentingan atau loyalitas (KNKG, 2006). Jumlah komisaris independen yang lebih tinggi terkait dengan kinerja keuangan

yang lebih baik (Aprila *et al.*, 2022).

(Titania & Taqwa, 2023) adanya hubungan positif yang signifikan secara statistik antara independensi komisioner dan indikator kinerja keuangan. Korelasi ini mengindikasikan mekanisme kausal di mana pengawasan yang lebih independen memperkuat pemantauan terhadap manajemen eksekutif dan anggota dewan lainnya, sehingga memastikan kepatuhan yang lebih ketat terhadap mandat pemegang saham. Hasil ini sejalan dengan dan memperkuat kesimpulan sebelumnya yang disampaikan oleh (Intia & Azizah, 2021) mengenai dampak positif struktur tata kelola independen terhadap kinerja. Jumlah anggota dewan komisaris independen yang lebih besar meningkatkan kualitas pengawasan, mengurangi kemungkinan perilaku manajerial yang mengutamakan kepentingan diri sendiri, dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Lukito & Abubakar Arief, 2024) menunjukkan hasil bahwa variabel dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Teori agensi mengharuskan adanya komisioner independen sebagai mekanisme pengendalian tata kelola, karena mereka secara objektif memantau perilaku manajemen untuk mencegah konflik kepentingan. Penelitian (Intia & Azizah, 2021) membuktikan bahwa pengawasan komisioner yang kuat meningkatkan persepsi investor. Peran dewan komisaris independen sebagai pencegahan terhadap pengambilalihan kekayaan oleh manajemen, mediator dalam konflik antara pemilik dan manajemen, dan mekanisme keseimbangan yang memastikan tidak ada pihak yang mendominasi pengambilan keputusan korporat

yang merugikan organisasi. Ketidakseimbangan dewan komisaris independen dalam menjalankan tanggung jawabnya dapat menimbulkan konflik keagenan, di mana pemegang saham dapat kehilangan kepercayaan terhadap manajemen akibat potensi kegagalan dalam memenuhi kewajiban finansial. Teori agen menekankan fungsi tata kelola yang kritis dari dewan komisaris yang independen dan kompeten dalam memediasi hubungan agen-prinsipal. Selain dampaknya yang dapat diukur terhadap hasil keuangan, komposisi dewan komisaris independen yang efektif secara fundamental mengubah dinamika kekuasaan antara kepemilikan dan manajemen, menyelaraskan pengambilan keputusan strategis dengan kepentingan pemegang saham sambil mempertahankan otonomi operasional.

Penelitian empiris yang didasarkan pada teori agen menunjukkan bahwa komisaris independen menciptakan nilai keuangan melalui dua saluran yang berbeda: pencegahan perilaku mementingkan diri sendiri oleh manajemen sebelum tindakan diambil melalui pengawasan yang ketat, dan peningkatan kinerja setelah tindakan dilakukan melalui bimbingan ahli. Kemandirian struktural mereka dari manajemen operasional memungkinkan evaluasi objektif terhadap keputusan bisnis, menciptakan kondisi untuk perbaikan keuangan yang berkelanjutan (Solikhah & Suryandani, 2021). Teori agensi dalam tata kelola perusahaan menegaskan pentingnya adanya mekanisme pengawasan yang efektif agar pemegang saham terlindungi dari kepentingan pribadi yang mungkin dipegang oleh manajemen. Komisioner independen memainkan peran kunci dalam perencanaan strategis jangka panjang dan tinjauan berkala terhadap implementasi strategi. Sebagai penjaga independen kualitas tata kelola, komisioner independen

melakukan pengawasan berkelanjutan terhadap operasional manajemen, memastikan kesesuaian dengan kerangka kerja tata kelola perusahaan yang telah ditetapkan. Kewenangan pengawasan mereka mencakup tinjauan preventif dan tindakan korektif untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap protokol yang berlaku (Prasetyo & Dewayanto, 2019).

Dewan komisaris independen adalah elemen penting dalam penerapan GCG. Sebagai mekanisme pengendalian internal yang paling tinggi, dewan komisaris memiliki peran untuk mengawasi manajemen puncak. Tanggung jawab dewan komisaris independen adalah memastikan bahwa perusahaan menjalankan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Bukti empiris menunjukkan adanya hubungan positif antara persentase komisioner independen dan pertumbuhan ROA. Hubungan kinerja ini berasal dari efek pengganda pengawasan: setiap anggota independen tambahan berkontribusi pada pengawasan manajemen yang lebih ketat, mengurangi biaya agen, dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan strategis. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dibentuklah hipotesis berikut ini:

H2: Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang menerapkan *Enterprise Resource Planning*.

2.3.3 Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Berbasis ERP

Menurut (Aprila *et al.*, 2022) proporsi anggota komite audit yang memadai memungkinkan pengawasan terhadap kinerja manajemen, sehingga perilaku manipulatif dalam pengelolaan laba dapat ditekan dan kualitas laba yang dilaporkan dapat meningkat. Pertumbuhan dalam representasi komite audit berkorelasi dengan

hasil keuangan yang lebih baik, menjadikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai langkah maju untuk peningkatan kinerja. Penciptaan nilai berasal dari mekanisme pengawasan yang kuat disertai implementasi prinsip-prinsip GCG akan memperkuat kepercayaan investor. Seperti yang dijelaskan oleh (Daljono & Margaret, 2023), komite audit menjalankan empat fungsi sinergis yaitu audit pengendalian internal, pengawasan atas optimalisasi laba, penyederhanaan operasional, dan pembentukan kepercayaan di pasar modal.

Komite audit memainkan peran kunci dalam mendukung dewan komisaris dengan mengawasi audit internal, manajemen risiko, pelaporan keuangan, dan praktik GCG di dalam perusahaan. Pengaruh komite terhadap kinerja keuangan didasarkan pada fungsi pengawasan yang dimilikinya, di mana komite melakukan pemeriksaan independen untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan dewan komisaris akurat, lengkap, dan disajikan secara transparan, sehingga memberikan gambaran yang dapat dipercaya dan tidak memihak kepada pemangku kepentingan mengenai kondisi keuangan perusahaan (Titania & Taqwa, 2023). Komite audit memainkan peran krusial dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dengan memastikan independensi dan akurasi pelaporan keuangan. Fungsi yang efektif dan efisien dari komite ini memperkuat tata kelola korporasi, yang secara langsung mempengaruhi keandalan pengungkapan keuangan. Selain pengawasan, komite ini berkontribusi pada optimalisasi keuntungan dan peningkatan kinerja keuangan dengan mengurangi risiko kerugian akibat aktivitas penipuan, seperti manipulasi laporan keuangan oleh manajemen untuk keuntungan pribadi. Selain itu, pengawasan berkelanjutan yang

dilakukan komite membantu mengurangi konflik kepentingan, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi (Lutuhfiana & Dewi, 2023).

Teori agen menyoroti potensi ketidakselarasan antara kepentingan pribadi manajer dan tujuan pemegang saham (*principals*). Untuk mengatasi konflik ini, komite audit berperan sebagai mekanisme pengawasan kritis, memeriksa pelaporan keuangan dan keputusan manajemen untuk memastikan keselarasan dengan tujuan korporasi. Melalui perannya dalam memastikan transparansi dan integritas pelaporan keuangan, komite audit menjembatani kesenjangan informasi antara perusahaan dan pemangku kepentingannya, termasuk pemegang saham, dengan menyediakan data yang kredibel dan tepat waktu. Pengurangan asimetri informasi ini memupuk budaya kepercayaan dan keyakinan, yang pada akhirnya berkontribusi pada hasil keuangan yang lebih baik, karena pemangku kepentingan yang terinformasi dengan baik lebih mampu mengambil keputusan yang mendukung kesuksesan dan kemakmuran jangka panjang perusahaan (Daljono & Margaret, 2023). Peran utama komite audit adalah mengawasi efektivitas pengendalian internal dan mengevaluasi kinerja auditor internal maupun eksternal. Dengan memberikan pengawasan ini, komite membantu mengurangi kecenderungan manajemen sebagaimana dijelaskan dalam teori agen untuk mengejar kepentingan pribadi di atas tujuan korporasi. Kerangka teoritis ini menempatkan komite audit sebagai mekanisme tata kelola yang vital untuk memantau perilaku eksekutif, dengan fungsi yang baik diharapkan dapat meningkatkan hasil keuangan organisasi (Rumaidia & Rahman, 2023). Sebagai landasan utama tata kelola korporasi, komite audit bertugas untuk

menyeimbangkan perbedaan kepentingan yang melekat antara manajemen dan pemegang saham. Keberadaan komite audit sangat penting dalam mengawasi transparansi keuangan, menjaga tata kelola internal, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Tugas-tugas penting ini membantu mencegah manajemen bertindak demi kepentingan pribadi dan melindungi kepentingan pemegang saham serta stabilitas keuangan organisasi.

Penelitian yang dilakukan oleh (Arimby & Astuti, 2023), mengungkapkan bahwa komite audit memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Komite ini memainkan peran kritis, karena pengawasan mereka dapat membentuk kinerja keseluruhan perusahaan. (Lukito & Abubakar Arief, 2024) menemukan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan, menunjukkan bahwa komite audit yang lebih besar memudahkan pemantauan pelaporan keuangan standar. Demikian pula, (Nopriani & Lestari, 2024), secara empiris membuktikan adanya hubungan positif yang signifikan secara statistik antara komite audit dan kinerja keuangan. Penelitian mereka menunjukkan bahwa komite audit meningkatkan perlindungan pemangku kepentingan dan memperkuat pengawasan atas operasi akuntansi dan keuangan, sehingga berkontribusi pada hasil keuangan yang lebih baik. Akibatnya, keberadaan komite audit dapat berfungsi sebagai penggerak untuk peningkatan kinerja keuangan dengan memastikan akuntabilitas dan keandalan yang lebih besar dalam pelaporan keuangan. Dengan demikian, hipotesis berikut ini dirumuskan:

H3: Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang menerapkan *Enterprise Resource Planning*.